

PENGENALAN MODEL JEMBATAN AKUNTABILITAS: SEBUAH KERANGKA EVALUASI PROGRAM UNTUK KONSELOR SEKOLAH

Wahyu Nanda Eka Saputra

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang
email: *wahyu.kons@gmail.com*

Abstract

One of evaluation model counseling programs is accountability bridge model. In this model, counseling evaluation cycle is divided into two cycles. The first cycle is counseling program evaluation and the second is counseling context evaluation cycle. Counseling program evaluation cycle focus on the result of counseling service, while counseling context evaluation cycle focus on the trial of counseling service impact by stake holder and uses its feedback, the result of need assessment for fostering and repairing the goal of counseling program. Both cycle are connected by accountability bridge, which the result of counseling practice is communicated to stakeholder in context of the bigger service system.

Keywords: *Accountability Bridge Model, Program Evaluation, Context Evaluation*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2001, No Child Left Behind (NCLB) disahkan dan menekankan pada pengujian siswa dan efektivitas guru (US Department of Education, 2001 dalam Coker, Astramovich & Hoskins, *tanpa tahun*). Gerakan ini membuka jalan bagi Asosiasi Konselor Sekolah Amerika (ASCA) untuk mengembangkan suatu kerangka kerja baru yang menekankan pada akuntabilitas dalam konseling sekolah (ASCA dalam Coker, Astramovich & Hoskins, *tanpa tahun*). Kedua upaya ini telah menciptakan peningkatan kinerja konselor sekolah dalam menunjukkan

efektivitas program konseling sekolah dan dampaknya terhadap prestasi siswa.

Evaluasi program merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang efisiensi, efektivitas, dan pengaruhnya terhadap program dan layanan (Boulmetis & Dutwin, dalam Coker, Astramovich & Hoskins, *tanpa tahun*).

Menurut Henderson (2004) mendefinisikan evaluasi sebagai komponen penting dari perkembangan program bimbingan dan konseling serta meyakinkan akuntabilitas yang bertujuan untuk menentukan nilai dari program, kegiatan, dan personel untuk membuat

keputusan atau mengambil tindakan di masa depan. Evaluasi program layanan konseling juga bisa menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan untuk memverifikasi kekuatan program layanan konseling (Otto, 2001). Konselor yang melaksanakan evaluasi program layanan bimbingan dan konseling, akan membantu konselor dalam menginformasikan praktik dan meningkatkan pelayanan konseling (Astramovich & Coker, 2007).

Coker, Astramovich & Hoskins (tanpa tahun) menjelaskan evaluasi program merupakan alat yang berharga untuk konselor sekolah karena dianggap sebagai jenis penelitian tindakan yang diarahkan untuk memonitoring dan memperbaiki program/layanan. Evaluasi ini dapat dilakukan pada skala yang lebih kecil, dapat direncanakan dan dilaksanakan oleh praktisi, serta dapat digunakan untuk mengkomunikasikan dampak program terhadap prestasi belajar siswa dan variabel lain yang berkaitan. Evaluasi program dapat membantu konselor untuk menjawab pertanyaan, antara lain:

a. Metode, Program dan intervensi apakah yang paling bermanfaat bagi siswa?

- b. Bagaimanakah tingkat kepuasan siswa dan guru terhadap layanan yang diterima?
- c. Bagaimana prestasi siswa telah dipengaruhi oleh intervensi/program khusus?
- d. Bagaimana penempatan kelas mempengaruhi prestasi belajar siswa?
- e. Seberapa baik tujuan program konseling sekolah terpenuhi?

2. PEMBAHASAN

Hambatan Evaluasi Program

Menurut Whiston (dalam Coker, Astramovich & Hoskins, *tanpa tahun*) hambatan konselor sekolah melakukan evaluasi program, antara lain:

- a. Kurangnya minat dan kemampuan konselor sekolah yang secara sistematis mengevaluasi layanan konseling.

Selain kurangnya minat konselor dalam melakukan evaluasi, kemampuan konselor merupakan faktor penting konselor yang melakukan evaluasi layanan konseling secara sistematis. Melakukan evaluasi program tidak memerlukan tingkat keahlian tertentu dalam metode penelitian dasar. Akan tetapi, konselor biasanya kurang berminat dan kurang mendapat pelatihan untuk

mempersiapkan mereka dalam melakukan evaluasi.

b. Konselor sekolah merasa kurang percaya terhadap kemampuannya untuk evaluasi.

Hambatan kedua pelaksanaan evaluasi program layanan konseling adalah kurangnya kepercayaan konselor terhadap kemampuannya dalam melakukan evaluasi. Kurang percaya pada kemampuan diri konselor dalam melakukan evaluasi meliputi mengumpulkan data, menganalisis data, dan menggunakan temuannya untuk memperbaiki program konseling. Kurang percaya pada kemampuan diri konselor tersebut ternyata menjadi salah satu hambatan konselor dalam pelaksanaan evaluasi layanan konseling.

c. Konselor sekolah merasa takut jika hasil evaluasi program yang didapat tidak mendukung gagasan bahwa program mereka efektif.

Hambatan ketiga adalah beberapa konselor telah mengakui jika mereka memiliki keterampilan untuk melakukan evaluasi program, akan ada rasa takut yang menyertainya dan temuan mereka tidak mendukung gagasan bahwa program mereka efektif. Padahal, jika melakukan evaluasi program, konselor

dapat bekerja lebih efektif dengan lebih fokus pada upaya pencegahan dan intervensi yang telah terbukti efektif daripada menghabiskan waktu mereka dalam tugas-tugas tambahan yang tidak langsung menguntungkan siswa.

d. Keterbatasan waktu yang dimiliki konselor sekolah

Ada anggapan dari konselor bahwa dalam melakukan evaluasi, terlalu banyak yang harus dilakukan, tapi terlalu sedikit waktu yang ada. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu penghambat pelaksanaan evaluasi layanan konseling.

e. Kurangnya dukungan dari administrator untuk melaksanakan evaluasi program

Konselor sekolah merupakan peran penting dan sentral dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Administrator selayaknya melihat konselor sekolah bukanlah sebagai personel pendukung yang perannya adalah untuk bereaksi terhadap permasalahan yang terjadi, melainkan sebagai personel kunci dalam tim pendidik yang tujuannya untuk memberikan persiapan akademis untuk semua siswa.

Beberapa hambatan konselor dalam melaksanakan evaluasi tersebut

mengakibatkan kegagalan konselor dalam melakukan evaluasi, sehingga, program pendidikan konselor telah dikritik karena gagal untuk memberikan pelatihan evaluasi dan penelitian untuk konselor baru (Borders; Heppner, Kivlighan, & Wampold; Sexton,; Sexton, Whiston, Bleuer, & Walz dalam Astramovich & Coker, 2007).

Evaluasi Program dan Akuntabilitas

Membedakan antara akuntabilitas dan evaluasi program sangat penting karena banyak yang menggunakan kedua istilah ini secara bergantian dan kadang-kadang sebagai kategori satu sama lain. Loesch (dalam Astramovich & Coker, 2007) menyatakan evaluasi program konseling membantu para praktisi memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pelayanan melalui pemeriksaan yang cermat dan sistematis komponen program, metodologi, dan hasil. Evaluasi program konseling memiliki nilai intrinsik yang membantu konselor merencanakan, melaksanakan, dan memperbaiki praktik konseling terlepas dari kebutuhan untuk menunjukkan akuntabilitas. Untuk memberikan bukti efektivitas dan dampak program, konselor dapat secara efektif

memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dari evaluasi program mereka sendiri.

Dengan demikian, konsep akuntabilitas konseling memberikan informasi spesifik kepada *stakeholder* dan otoritas pengawas lainnya tentang efektivitas dan efisiensi pelayanan konseling Studer & Sommers (dalam Astramovich & Coker, 2007). menunjukkan akuntabilitas membentuk jembatan antara praktik konseling dan konteks yang lebih luas dari dampak layanan pada *stakeholder*. Dengan demikian, akuntabilitas tidak harus menjadi satu-satunya motivasi untuk evaluasi program konseling. Loesch memaparkan (dalam Astramovich & Coker, 2007) evaluasi program konseling harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan konseling bukan hanya memberikan pembenaran untuk program yang ada.

Model Evaluasi Program Jembatan Akuntabilitas

Konselor sekolah profesional sebagai bagian dari tim pendidik di sekolah memiliki kinerja yang menunjang pencapaian tujuan yang dicanangkan oleh sekolah (Dahir & Stone, 2009). Kinerja

konselor sekolah tersebut tertuang dalam program layanan konseling dan program tersebut terbukti keefektifannya dalam pencapaian tujuan sekolah dan peningkatan prestasi belajar siswa (Astramovich, Coker & Hoskins, tanpa tahun).

Menurut Bardhoshi & Duncan (2013) untuk menunjukkan efektifitas program layanan konseling di sekolah yang bisa diukur (*measurable*), konselor sekolah yang profesional melaporkan bagaimana siswa memperoleh keuntungan sebagai hasil dari program layanan konseling di sekolah. Konselor sekolah yang profesional menggunakan data untuk menunjukkan pengaruh program layanan konseling dalam peningkatan sekolah dan prestasi siswa. Konselor sekolah profesional melakukan audit program konseling di sekolah sebagai petunjuk pelaksanaan tindakan di masa depan.

Banyak literatur yang mengekspresikan kebutuhan konselor sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi, tetapi banyak konselor sekolah yang gagal melakukannya. Berbagai macam alasan konselor sekolah tidak melaksanakan evaluasi program adalah adanya kekhawatiran dari

konsekuensi negatif dari evaluasi, kurangnya pelatihan, kurangnya finansial dan sumber daya manusia, kendala waktu, tidak memahami kriteria pengukuran, dan muncul anggapan kegiatan evaluasi adalah berat dan sulit (Edwards, 2009).

Salah satu model evaluasi program layanan konseling adalah model jembatan akuntabilitas. Model evaluasi program jembatan akuntabilitas dikembangkan oleh Astramovich dan Coker (Edwards, 2009). Model evaluasi program jembatan akuntabilitas ini digunakan di Las Vegas (Astramovich & Coker, 2007). Model jembatan akuntabilitas merupakan kerangka kerja yang dikembangkan dapat membantu memfasilitasi keduanya yaitu melakukan evaluasi program dan mengkomunikasikan hasil. Model jembatan akuntabilitas dirancang untuk membantu konselor sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap efektivitas dan dampak dari layanan mereka.

Menurut Astramovich & Coker (2007) pada model jembatan akuntabilitas ini, evaluasi konseling dibagi dalam dua siklus kejadian. Siklus pertama adalah siklus evaluasi program konseling dan siklus kedua adalah siklus

evaluasi konteks konseling yang mewakili perbaikan terus-menerus terhadap layanan berdasar hasil, umpan balik *stakeholder*, dan kebutuhan populasi yang dilayani. Siklus evaluasi program konseling berfokus pada persediaan dan hasil layanan konseling, sedangkan siklus evaluasi konteks konseling pengujian dampak layanan konseling oleh *stakeholder* dan menggunakan umpan baliknya, bersama dengan hasil dari *need assesment*, untuk membangun dan memperbaiki tujuan program konseling. Kedua siklus dihubungkan oleh sebuah jembatan akuntabilitas, di mana hasil dari praktik konseling dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam konteks sistem pelayanan yang lebih besar. Memberikan pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* merupakan bagian integral dari model ini. Gambar siklus model evaluasi program jembatan akuntabilitas menurut Astramovich, R.L. & Coker, J.K. (2007) dapat dilihat pada Gambar 1:

Figure 1.
Accountability Bridge Counseling Program Evaluation Model



Dua siklus evaluasi program konseling jembatan akuntabilitas pada gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Siklus Evaluasi Program Konseling

Siklus evaluasi program konseling meliputi empat tahap, yaitu perencanaan program, implementasi program, monitoring, dan perbaikan program, dan penilaian hasil (Astramovich & Coker, 2007). Pada tahap perencanaan program, informasi dikumpulkan dari pelaksanaan *need assesment* dan identifikasi tujuan layanan, program dan layanan konseling direncanakan dan dikembangkan.

Pada tahap ini, konselor sekolah mengidentifikasi intervensi dan program yang akan dilaksanakan serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan implementasi, termasuk staf, fasilitas dan bahan-bahan khusus (Royse dkk., dalam Astramovich & Coker, 2007). Pada tahap ini juga, konselor sekolah perlu sengaja merencanakan cara-cara mereka untuk menilai hasil.

Sarana untuk menilai hasil dapat mencakup instrumen pra-post, indikator kinerja, dan daftar cek. Selain itu, data dasar yang tersedia di sekolah, data *self-report*, dan data hasil diobservasi dapat

digunakan (Gysbers & Henderson, 2000; Studer & Sommers, dalam Coker, Astramovich & Hoskins, tanpa tahun).

Pada tahap implementasi program, konselor sekolah memulai program dan layanan. Menurut Astramovich & Coker (2007) tahap ini *kadang-kadang* disebut sebagai evaluasi formatif karena pemberian layanan terbentuk berdasarkan input dari siklus evaluasi konteks. Selama pelaksanaan program, konselor dapat mengidentifikasi perbedaan antara program yang direncanakan dan realitas penyiapan layanan. Oleh karena itu, pada tahap ini, keputusan dapat dibuat untuk mengubah program sebelum program-program tersebut sepenuhnya operasional atau untuk membuat perbaikan dalam program dan layanan sesuai dengan kebutuhan yang muncul.

Pada tahap monitoring dan perbaikan program, konselor perlu melakukan penyesuaian terhadap praktik mereka berdasarkan hasil awal dan umpan balik dari *konseli* dan pihak lain yang berkepentingan. Program dan layanan ada kemungkinan perlu disempurnakan dan diubah untuk berhasil memenuhi kebutuhan *konseli* yang dilayani. Monitoring keberhasilan program membantu untuk memastikan kualitas

layanan konseling dan memaksimalkan kemungkinan menemukan hasil positif selama penilaian hasil (Astramovich & Coker, 2007).

Tahap terakhir dari siklus evaluasi program adalah tahap penilaian hasil. Menurut Astramovich & Coker (2007) hasil penilaian membantu untuk menentukan apakah tujuan telah dipenuhi. Oleh karena itu, selama tahap penilaian hasil, data akhir dikumpulkan, dan semua data program dianalisis untuk menentukan hasil dari intervensi dan program.

Konselor sekolah dengan keterbatasan pengetahuan dan pelatihan dalam metode penelitian, mungkin perlu berkonsultasi dengan kolega atau supervisor untuk membantu penganalisisan. Penggunaan program perangkat lunak untuk analisis data (misalnya, *SPSS*, *SAS*, *Microsoft Excel*) dapat membantu mempercepat interpretasi dan penyajian data.

b. Jembatan Akuntabilitas

Proses pengkomunikasian hasil program untuk *stakeholder* utama sebagai jembatan akuntabilitas antara program konseling dan konteks layanan konseling (Astramovich & Coker, 2007). Data hasil

program dan temuan-temuan evaluasi merupakan sarana untuk memberikan informasi tentang efektivitas program untuk para *stakeholder*. Ketika konselor diminta untuk menunjukkan efektivitas dan efisiensi program, mereka dapat menunjukkan informasi dari siklus evaluasi program konseling kepada pihak yang berkepentingan. Administrator, orang tua, personil kantor pusat, siswa, konselor sekolah lainnya, dan guru mewakili beberapa *stakeholder* yang mungkin memiliki investasi utama dalam keberhasilan siswa.

Berkomunikasi dengan stakeholder mewakili pengambilan sikap proaktif yang dirancang untuk membantu konselor sekolah memelihara dukungan untuk layanan mereka dan meningkatkan permintaan untuk layanan mereka (Ernst & Hiebert dalam Coker, Astramovich & Hoskins, tanpa tahun). Komunikasi hasil dapat disampaikan melalui beberapa bentuk termasuk laporan, ringkasan, presentasi, dan diskusi.

c. Siklus Evaluasi Konteks Konseling

Siklus evaluasi konteks konseling merupakan siklus kedua dalam model ini. Siklus evaluasi konteks konseling berfokus pada dampak praktik konseling

telah sampai pada *stakeholder* dalam konteks sistem organisasi yang lebih besar. Siklus ini mencakup pemberian umpan balik *stakeholder*, perencanaan strategis, *need assesment*, dan tujuan layanan.

Selama tahap pemberian umpan balik dari *stakeholder*, konselor secara aktif mengumpulkan umpan balik berdasarkan hasil komunikasi. Umpan balik *stakeholder* dianggap sebagai elemen penting dalam desain layanan konseling. Viabilitas layanan konseling dipertahankan melalui siklus terus-menerus dari umpan balik *stakeholder* mengenai perkembangan tujuan dan desain program serta evaluasi layanan konseling (Ernst & Hiebert dalam Astramovich & Coker, 2007).

Setelah umpan balik, konselor sekolah terlibat dalam perencanaan strategis yang mencakup pengujian dan kemungkinan revisi terhadap misi dan visi keseluruhan program konseling sekolah (Astramovich & Coker, 2007). Tahap ini merupakan perwakilan dari konteks di mana program konseling sekolah terjadi, dan memperhitungkan dampak program terhadap keseluruhan misi dan visi lingkungan sekolah.

Tahap selanjutnya adalah tahap *need assesment*. *Need assesment* menjadi aspek penting yang perlu dilakukan konselor dalam membuat program BK yang komprehensif (Gysbers & Henderson, 2006). Menurut Astramovich & Coker (2007) tahap *need assesment* dapat menyediakan informasi penting bagi konselor sekolah untuk merancang dan mendefinisikan ulang keseluruhan program dan layanan konseling sekolah yang ditawarkan di dalamnya. Penilaian kebutuhan tidak hanya termasuk mengenali kebutuhan populasi siswa, tetapi juga kebutuhan *stakeholder* lainnya, seperti tenaga administrasi, wali murid dan guru. Penilaian kebutuhan yang komprehensif, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan perencanaannya berdasar pemikiran tujuan yang jelas (Royse, Thyer, Padgett, & Logan, 2001 dalam Coker, Astramovich & Hoskins, tanpa tahun).

Pengidentifikasi tujuan layanan seharusnya didasarkan pada hasil pelayanan konseling sebelumnya, umpan balik stakeholder tentang perencanaan strategis, dan hasil penilaian kebutuhan (Astramovich & Coker, 2007). Sebuah komponen kunci dari implementasi program adalah membangun intervensi

dan strategi yang memiliki tujuan yang dirancang secara jelas dan objektif. Jika implementasi program tidak memiliki tujuan yang dikenali, mereka tidak secara memadai mengevaluasi efektivitas. Setelah tujuan layanan ditetapkan, seluruh siklus evaluasi konteks konseling akan kembali lagi ke dalam tahap perencanaan program tentang siklus evaluasi program konseling.

Implikasi

Dengan penekanan pada akuntabilitas baik dalam pendidikan dalam konseling umum dan sekolah, khususnya, konselor sekolah tidak bisa lagi mempertanyakan kebutuhan untuk mengevaluasi program-program mereka. Dengan konseptualisasi evaluasi program sebagai proses berkolaborasi, konselor sekolah mungkin lebih tertarik dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam evaluasi program. Model jembatan akuntabilitas memberikan konselor sekolah dengan kerangka kerja untuk melibatkan stakeholder kunci, mengambil sikap proaktif ketika menunjukkan dampak dari program-program mereka, dan memanfaatkan evaluasi dan penilaian metode praktis untuk menganalisis hasil.

3. KESIMPULAN

Konselor profesional secara aktif mempelajari dan menggunakan metode evaluasi sebagai sarana meningkatkan praktik konseling, memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*, dan meningkatkan identitas profesional konselor. Para profesional konseling secara bertahap mulai menyadari bahwa evaluasi program konseling harus dimulai dan dilaksanakan oleh konselor. Salah satu model evaluasi program konseling adalah model jembatan akuntabilitas. Pada model ini, evaluasi konseling dibagi dalam dua siklus. Siklus pertama adalah siklus evaluasi program konseling dan siklus kedua adalah siklus evaluasi konteks konseling. Siklus evaluasi program konseling berfokus pada hasil layanan konseling, sedangkan siklus evaluasi konteks konseling berfokus pada pengujian dampak layanan konseling oleh *stakeholder* dan menggunakan umpan baliknya, bersama dengan hasil *need assesment*, untuk membangun dan memperbaiki tujuan program konseling. Kedua siklus dihubungkan oleh jembatan akuntabilitas, di mana hasil dari praktek konseling dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam konteks sistem pelayanan yang lebih besar.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Astramovich, R.L. & Coker, J.K. (2007). Program Evaluation: The Accountability Bridge Model for Counselors. *Journal of Counseling & Development*, 85: 162-172.
- Astramovich, R. L., Coker, J. K., & Hoskins, W. J. Tanpa tahun. Training school counselors in program evaluation. American School Counseling Association.
- Bardhoshi, G. & Duncan, K. (2013). South Dakota Comprehensive School Counseling Program Model, (Online), (doe.sd.gov/documents/CounselMdl.pdf), diakses 20 Februari 2014.
- Coker, J. K., Astramovich, R. L. & Hoskins, W. J. Tanpa tahun. Introducing the Accountability Bridge Model: A Program Evaluation Framework for School Counselors.
- Dahir, C.A. & Stone, C.B. (2009). School Counselor Accountability: The Path to Social Justice and Systemic Change. *Journal of Counseling & Development*, 87: 12-20.
- Edwards. L. (2009). Accountability Practices of School Counselors. Disertasi. Auburn University.
- Gybers, C.N. & Henderson, P. (2006). Developing & Managing Your School Guidance and Counseling Program. American Counseling Association: Alexandria.

Henderson, P. (2004). A Process for Evaluating a Comprehensive, Developmental, Guidance and Counseling Program. Texas Education Agency.

Otto, C.N.C. (2001). An Evaluation of the School Counseling Program at Stillwater Area Schools in Stillwater, Minnesota. University of Wisconsin-Stout: The Graduate College.